

**PENYALURAN DANA FILANTROPI DALAM KEBENCANAAN DI ERA
DIGITAL : STUDI KASUS BAZNAS TANGGAP BENCANA REPUBLIK
INDONESIA**



Oleh :

Abdul Hadi

NIM : 23200011111

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master
of Arts (M.A.) Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Filantropi, Kebencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hadi
NIM : 23200011111
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Filantropi, Kebencanaan dan Pembanguna Berkelanjutan

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Abdul Hadi

NIM: 23200011111

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hadi
NIM : 23200011111
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Filantropi, Kebencanaan dan Pembanguna Berkelanjutan

Dengan ini menyatakan bahwa naskah tesis ini bebas dari unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti terjadi tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan akademik yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Abdul Hadi

NIM: 23200011111



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-917/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENYALURAN DANA FILANTROPI DALAM KEBENCANAAN DI ERA DIGITAL:
STUDI KASUS BAZNAS TANGGAP BENCANA REPUBLIK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL HADI, S.Kom
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011111
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 689d7363af0cd



Penguji II

Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., P.hD.
SIGNED

Valid ID: 689e60f09f4cc



Penguji III

Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 689d4c3b2d6c1



Yogyakarta, 07 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 689eccc6c57e25

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **ANALISIS PENYALURAN DANA FILANTROPI DALAM KEBENCANAAN DI ERA DIGITAL DAN PERSPEKTIF NILAI 3A : STUDI KASUS BAZNAS TANGGAP BENCANA REPUBLIK INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Hadi
NIM : 23200011111
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2025
Pembimbing,



Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., PhD

ABSTRAK

Di era digital, penguatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan khususnya lembaga filantropi berbasis zakat dalam situasi kebencanaan seperti BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) menjadi semakin penting, seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap efektivitas, efisiensi, dan kolaborasi antar instansi. Namun, sistem digital yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika respon kebencanaan yang cepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kelembagaan, pemanfaatan teknologi dalam distribusi dana kebencanaan, serta penerapan nilai 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI) di tingkat operasional.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, menggunakan kerangka *Technology-Organization-Environment (TOE) Framework*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan pada unit yang terkait, dan telaah dokumen pada bulan Mei - Juni 2025. Delapan informan dipilih dengan teknik *purposive*. Kemudian alat untuk menganalisis data menggunakan *grounded theory* dengan tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* untuk mengidentifikasi tema, mengelompokkan kategori, dan menemukan hubungan antarkonsep. Temuan lapangan dipadukan dengan kerangka TOE dan nilai 3A guna membangun sintesis teori dan kontribusi konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan BTB telah berjalan sistematis dari pengajuan hingga pelaporan. Adanya dukungan sistem digital internal dan pemanfaatan aplikasi external. Sisi lain beberapa tahapan masih bersifat manual. Hambatan utama ditemukan pada birokrasi otorisasi, keterbatasan SDM, keterpaduan sistem, serta minimnya infrastruktur di lapangan. Nilai-nilai 3A telah mulai diterapkan, namun indikator teknisnya belum sepenuhnya dituangkan dalam aturan formal dan diimplementasikan.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya adopsi teknologi yang kontekstual dalam lembaga filantropi. Secara praktis, direkomendasikan pengembangan sistem terpadu yang adaptif, akuntabel, transparan, serta penguatan regulasi berbasis nilai 3A untuk seluruh unit BAZNAS RI dan daerah. Arah penelitian selanjutnya mencakup *system alignment* dengan indikator teknis 3A, fleksibilitas regulasi pada situasi bencana, dan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang lebih terstruktur.

Kata kunci: Filantropi kebencanaan, TOE *Framework*, teknologi digital, BAZNAS Tanggap Bencana

MOTTO

Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al-Baqarah : 201).

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in

"Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan" (QS. Al-Fatihah : 5).

Tujuan hidup berharap meraih kesuksesan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dalam setiap langkah, senantiasa memohon agar ketauhidan dan sikap tawakal kepada Allah tetap terjaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada الله عز وجل, karya ini saya persembahkan kepada الله, sumber segala ilmu dan kekuatan, tempat bergantung dalam setiap langkah dan harap. Kepada keluarga tercinta, kepada Amilin dan Amilat, Muzaki dan Mustahik BAZNAS Republik Indonesia, kepada Almamater Program Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada rekan-rekan beasiswa cendekia BAZNAS sepejuangan, yang telah menjadi teman diskusi dan bagian dari kisah perjalanan berharga ini dan kepada PT Midi Utama Indonesia.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal jariyah, manfaat bagi pembaca, dan awal dari kontribusi yang lebih besar bagi BAZNAS dan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah عز وجل yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan judul “**Penyaluran Dana Filantropi Dalam Kebencanaan di Era Digital: Studi Kasus BAZNAS Tanggap Bencana Republik Indonesia**“ sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam bidang keilmuan dan praktik filantropi kebencanaan di Indonesia.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan sahabatnya, sebagai suri teladan dalam menebar kasih sayang dan semangat menuntut ilmu. Penyusunan karya ini tentunya tidak lepas dari do`a, bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Dengan tulus dan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Keluarga tercinta, orang tua, Sadiyah S.Pd., dan seluruh anggota keluarga atas doa, dukungan moral, kesabaran, serta kesediaannya untuk mengikhhlaskan waktu kebersamaan demi kelancaran proses studi, penelitian, dan penyusunan tesis ini.
2. Ketua BAZNAS RI, Bapak Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI, Bapak Mokhamad Mahdum, SE., MIDEc., Ak., CA., CPA.,CWM., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digitalisasi Nasional Bapak Prof. Ir. Muh. Nadrattuzaman Hosen, seluruh pimpinan, Amil, terkhusus untuk Direktur Direktorat Inovasi Teknologi Informasi Bapak Achmad Setio

Adinugroho, rekan-rekan Squad IT dan Amilin-Amilat, yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan support kepada penulis untuk menempuh studi magister melalui program beasiswa, hingga penyelesaian tugas akhir ini.

3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D., Ketua Program Studi Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Najib Kailani, S.Fil.I., MA., Ph.D., Sekretaris Program Studi Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Subi Nur Isnaini., Lc., MA., yang memberikan kesempatan dan kemudahan dalam proses akademik selama masa perkuliahan.
4. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA., atas motivasi dan nasihat yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan proses penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing Tesis, Ibu Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D., atas bimbingan yang penuh kesabaran, perhatian, semangat, serta arahan yang jelas, sistematis sejak tahap awal penyusunan proposal, pemilihan metodologi, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan dan penyempurnaan naskah tesis pasca ujian akhir.
6. Para penguji tesis Bapak Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I (Ketua Sidang), Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D. (Penguji), serta Ibu Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

(Pembimbing), atas masukan yang sangat berharga dalam memperbaiki aspek teknis maupun substansi tesis, sehingga naskah ini menjadi lebih mudah dipahami dan memiliki nilai akademik yang lebih baik.

7. Segenap dosen dan staf Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan dan pengurusan administrasi berlangsung, juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Kepada PT Midi Utama Indonesia melalui program “Sedekah Konsumen Alfamidi” yang bekerja sama dengan program beasiswa cendekia BAZNAS RI, atas dukungan pembiayaan beasiswa yang telah penulis terima.
9. Kepada sahabat saya Bapak Muhammad Munanto dan seluruh rekan-rekan seperjuangan Beasiswa Cendekia BAZNAS, atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai selama menjalani proses ini.
10. Kepada keluarga Kiyai Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.i (Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Sleman) atas support, doa dan kebaikannya.
11. Kepada para informan, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman berharga selama proses penelitian.

Terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari kontribusi nyata untuk penelitian selanjutnya dan penguatan peran filantropi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. *Barakallahu fiikum.*

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

Penulis

Abdul Hadi, S.Kom

NIM. 23200011111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GLOSARIUM

Nilai 3A	: (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) merupakan prinsip kelembagaan yang dicanangkan oleh BAZNAS untuk menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan norma agama, hukum negara, dan kepentingan integrasi nasional.
Amil	: Orang atau pihak yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat.
Asnaf	: Delapan golongan penerima manfaat zakat yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam. Dalam konteks kebencanaan, penyintas bencana dapat dikategorikan sebagai asnaf fakir miskin dalam keadaan darurat.
Audit ISO	: Sebuah bentuk tekanan regulasi eksternal yang digunakan untuk menilai kualitas, keamanan, dan ketahanan sistem digital di BAZNAS, khususnya dalam manajemen informasi dan infrastruktur digital.
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional lembaga filantropi resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional, didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
BTB	: BAZNAS Tanggap Bencana unit khusus di bawah Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI yang dibentuk untuk memperkuat peran BAZNAS dalam memberikan respons kebencanaan yang cepat, tepat, dan berdaya guna, serta menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko kemiskinan akibat bencana
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana lembaga formal di tingkat pusat yang bertanggung jawab di semua fase siklus bencana, mulai dari pra-bencana hingga pasca bencana.

BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah lembaga formal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di semua fase siklus bencana.
DALEV	: Direktorat Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian internal BAZNAS
Digitalisasi Lembaga Filantropi	: Proses transformasi cara lembaga filantropi mengelola, menyalurkan, dan melaporkan penggunaan dana sosial melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
DITI	: Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi di BAZNAS yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan inovasi teknologi informasi secara nasional.
Intranet	: Sistem digital internal BAZNAS RI yang digunakan untuk pertukaran dokumen dan komunikasi internal, serta pengajuan Memorandum Persetujuan Penyaluran ZIS (MPZIS).
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai media untuk menyebarluaskan regulasi hukum yang bersifat terbuka.
<i>Kobo Toolbox/Kobo Collect</i>	: Aplikasi yang memungkinkan input data secara offline dan tagging lokasi, digunakan oleh petugas lapangan untuk pencatatan kejadian bencana dan pendataan pengungsi.
MPZIS	: Dokumen wajib dalam proses persetujuan dana, berisi rincian kebutuhan dan disetujui beberapa level pimpinan sebelum menjadi dasar perintah pencairan dana ke bagian keuangan.
PPDL	: Sistem yang digunakan oleh unit Biro Hukum di BAZNAS melalui intranet untuk pengajuan dokumen hukum secara digital.
<i>Purposive Sampling</i>	: Teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif di mana individu dipilih berdasarkan pengetahuan, posisi strategis, dan pengalaman langsung dalam proses penyaluran dana filantropi kebencanaan.

RKAT	: Dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan proyeksi tahunan serta tren kebencanaan sebelumnya, menjadi acuan bagi proses pengelolaan dan pencairan anggaran melalui sistem digital.
Santripreneur	: Salah satu dari sepuluh program prioritas BAZNAS untuk tahun 2025, bertujuan pemberdayaan UMKM santri guna mewujudkan generasi santri yang produktif, inovatif, tangguh, dan mandiri secara ekonomi sesuai prinsip syariah.
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i> dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf dapat digunakan secara strategis untuk mendukungnya serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
SIMBA	: Platform digital yang digunakan BAZNAS untuk pendataan muzaki dan mustahik, pelaporan keuangan, serta monitoring kinerja, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS di seluruh Indonesia.
SIMKEU	: Sistem internal yang berfungsi dalam proses pengajuan dan pencairan dana, serta mencatat transaksi keuangan secara digital di BAZNAS.
SITREP	: Laporan situasi yang memuat data kondisi bencana, lokasi, waktu kejadian, hingga dokumentasi foto atau video sebagai syarat kelayakan distribusi bantuan, serta dilaporkan harian ke pimpinan pusat.
SOP	: Pedoman kerja formal yang mengatur proses digitalisasi dan menjadi acuan operasional dalam proses pengajuan, pencairan, hingga pelaporan dana bantuan kebencanaan.
TOE <i>Framework</i>	: Model konseptual yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990) untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi teknologi berdasarkan tiga dimensi utama: teknologi, organisasi, dan lingkungan.

Z-Chicken	: Salah satu dari sepuluh program prioritas BAZNAS untuk tahun 2025, merupakan program kuliner inovatif untuk meningkatkan pendapatan mustahik.
ZCD	: Zakat Community Development salah satu program BAZNAS yang berfokus pada pengangkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi berbasis zakat.
ZIS	: Zakat, Infak, Sedekah instrumen filantropi Islam yang dikelola oleh BAZNAS untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, termasuk dalam penanganan bencana.
ZISWAF	: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf instrumen filantropi Islam yang berfungsi sebagai ibadah dan mekanisme sosial untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.
Z-Mart	: Salah satu dari sepuluh program prioritas BAZNAS untuk tahun 2025, berupa pendampingan usaha kecil untuk kemandirian ekonomi para mustahik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR GLOSARIUM	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Signifikansi Penelitian	6
3. Keterbatasan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	13
1. Filantropi Islam dan Pengelolaan Dana ZIS dalam Kebencanaan	13
2. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi.....	17
3. Digitalisasi Lembaga Filantropi	21
E. Kerangka Teori	22
1. Kerangka Konseptual	23
2. Kerangka Teori (TOE <i>Framework</i>).....	30
F. Metode Penelitian	37
1. Metode Penelitian Kualitatif	37
2. Data Penelitian	38
3. Teknik Analisis Data.....	41
G. Sistematika Pembahasan	43

BAB II	
KONTEKS KELEMBAGAAN DAN LEMBAGA FILANTROPI	
KEBENCANAAN DI INDONESIA	46
A. Peta Kebencanaan di Indonesia.....	46
B. Praktik Filantropi Kebencanaan di Indonesia.....	49
1. Peran Lembaga Filantropi dalam Respons Kebencanaan	49
2. Lembaga Filantropi Kebencanaan di Indonesia	56
3. Profil Umum Lembaga Filantropi dalam Respon Kebencanaan.....	63
C. Profil BAZNAS dan BTB	67
1. BAZNAS.....	67
2. BAZNAS Tanggap Bencana	74
D. TOE Framework dengan Nilai 3A dalam Konteks BTB	79
E. Profil Informan	82
BAB III	
PROSES PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PENYALURAN	
BANTUAN BAZNAS TANGGAP BENCANA DAN KESESUAIAN DENGAN	
NILAI 3 A	85
A. Pendekatan Pengelolaan Data	85
B. Pemetaan Proses Penyaluran Dana Filantropi Kebencanaan di BAZNAS	87
1. Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Administratif Penyaluran Dana ...	87
2. Proses Operasional BTB di Lapangan dan Tantangan Pelaksanaan.....	97
C. Bentuk Pemanfaatan Teknologi yang Digunakan	108
1. Jenis Teknologi yang Digunakan dalam Proses Penyaluran.....	108
2. Fungsi dan Peran Teknologi dalam Setiap Tahapan.....	116
D. Faktor-faktor yang Memengaruhi Sistem Penyaluran dan Kesesuaiannya	
dengan Nilai 3A	124
1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sistem Penyaluran.....	124
2. Kesesuaian Sistem Penyaluran dengan Nilai 3A	138
BAB IV	
ANALISIS PENYALURAN DANA FILANTROPI DALAM KEBENCANAAN	
OLEH BAZNAS TANGGAP BENCANA RI.....	146
A. Pengantar Analisis.....	146
B. Proses penyaluran dana dan filantropi bencana.....	148
1. Dimensi Teknologi.....	148
2. Dimensi Organisasi	152
3. Dimensi Lingkungan.....	156
C. Faktor yang Mempengaruhi Dana Kebencanaan.....	159

1. Faktor Pendorong	163
2. Faktor Penghambat.....	182
D. Penyaluran Dana Filantropi Dalam Kebencanaan: Sintesis Kerangka Toe Dan Dengan Nilai 3A.....	200
BAB V	
PENUTUP	203
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran	204
DAFTAR PUSTAKA	213
LAMPIRAN.....	221
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	224



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kejadian Bencana Selama Januari 2021 - Juni 2025
Tabel 2.2	Lembaga Filantropi dalam Kebencanaan
Tabel 2.3	Satuan Kerja BAZNAS RI periode tahun 2020 - 2025
Tabel 2.4	Data Informan
Tabel 3.1	Rangkuman Temuan dari Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Administratif Penyaluran Dana
Tabel 3.2	Rangkuman Temuan dari Proses Operasional BTB di Lapangan dan Tantangan Pelaksanaan
Tabel 3.3	Rangkuman Temuan dari Jenis Teknologi yang Digunakan dalam Proses Penyaluran
Tabel 3.4	Rangkuman Temuan dari Fungsi dan Peran Teknologi dalam Setiap Tahapan
Tabel 3.5	Rangkuman Temuan dari Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sistem Penyaluran
Tabel 3.6	Rangkuman Temuan dari Jenis Teknologi yang Digunakan dalam Proses Penyaluran
Tabel 4.1	Integrasi TOE Framework dengan Prinsip 3A pada Penyaluran Dana Kebencanaan BAZNAS Tanggap Bencana
Tabel 4.2	Ringkasan Faktor Pendorong dan Penghambat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya karena letak geografis Indonesia berada pada zona pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang menyebabkan tingginya potensi aktivitas geologi di kawasan ini.¹ Akibatnya, ada sekitar 90% gempa bumi di dunia terjadi di wilayah *Ring of Fire* tersebut.² Kondisi ini menyebabkan tingginya potensi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan bencana geologi lainnya, yang diperparah dengan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dalam kurun 2022–2024 terjadi ribuan bencana setiap tahun, berdampak pada jutaan jiwa, korban meninggal, serta kerusakan luas pada infrastruktur dan fasilitas umum.³

Tingginya frekuensi dan dampak bencana menuntut respons yang cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam ekosistem kebencanaan nasional, selain pemerintah melalui

¹ Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance, “*Understanding Natural Hazards: Risks Facing Indonesia*” (2020), accessed April 30, 2025, https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=OCNVOF_NKIk%3D&portalid=0.

² National Geographic Society, “*Plate Tectonics: Ring of Fire*,” *National Geographic Education*, accessed April 30, 2025, <https://education.nationalgeographic.org/resource/plate-tectonics-ring-fire>.

³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “*Geo Portal Data Bencana Indonesia 2024*,” accessed July 3, 2025, <https://gis.bnpb.go.id/>.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lembaga filantropi Islam seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Unit khusus BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dibentuk untuk menangani tahapan tanggap darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi pascabencana.⁴

Namun, tantangan utama yang dihadapi BTB adalah kesenjangan antara kecepatan penghimpunan dana, efektivitas penyaluran bantuan, akurasi, dan transparansi, terlebih pada kondisi darurat, medan sulit, atau data penerima yang belum terverifikasi secara digital. Penelitian Tuankumala dan Arminingsih menunjukkan bahwa filantropi digital di Indonesia lebih banyak diterapkan pada penghimpunan dana, sementara penyaluran masih dominan dilakukan secara konvensional.⁵ Kesenjangan ini berpotensi menghambat respons cepat di situasi darurat. Sejalan dengan itu, Meshari Al-Daihani *et al.* mengusulkan model keuangan sosial Islam terintegrasi yang menghubungkan proses penghimpunan dan penyaluran, untuk meningkatkan efisiensi penanggulangan bencana.⁶

⁴ Website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Program Kebencanaan," accessed Mei 22, 2025, <https://baznas.go.id/program/kebencanaan>.

⁵ Muhammad Agip Tuankumala and Diah Arminingsih, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalimantan Barat," *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam 1* (2023): 173–179.

⁶ Meshari Al-Daihani et al., "Islamic Social Finance and Its Potential in Addressing Natural Disaster Emergencies and Advancing Sustainable Development Goals: A Proposed Model," *International Journal of Ethics and Systems*, March 24, 2025, <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2024-0138>.

Kendala distribusi bantuan juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemanfaatan sistem digital yang mampu menghubungkan kedua proses tersebut. Pulungan *et al.* menegaskan bahwa platform digital zakat dan aplikasi mobile dapat memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi hambatan seperti keterbatasan SDM, kesenjangan literasi digital, dan penyesuaian sistem internal masih menghambat integrasi penuh.⁷

Dalam praktiknya, BAZNAS telah mengembangkan platform Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk pengelolaan data muzaki dan mustahik, pelaporan keuangan, serta monitoring kinerja. Namun, fokus SIMBA masih pada manajemen keuangan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan distribusi kebencanaan yang dinamis.⁸ Padahal, jika diintegrasikan dengan prinsip 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI), digitalisasi berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memastikan proses penyaluran dana terekam secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diaudit secara *real-time*.⁹ Prinsip Aman Syar'i terjaga melalui verifikasi penerima yang sesuai asnaf, Aman Regulasi diperkuat dengan jejak audit yang patuh hukum, dan Aman NKRI tercermin dari sistem terpusat yang mendukung akuntabilitas publik secara nasional.

⁷ Sulaika Pulungan *et al.*, "The Digital Innovation in Zakat Collection and Distribution: Opportunities and Challenges," in *Proceedings of the 8th International Conference of Zakat (ICONZ)*, 2024, 423–432, <https://doi.org/10.37706/iconz.2024.911>.

⁸ BAZNAS RI, "SIMBA-UPZ: Penguatan Pelaporan dan Pengendalian Zakat Digital," *baznas.go.id*, accessed May 22, 2025. https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan_Pengendalian_dan_Pelaporan_Zakat_BAZNAS_Luncurkan_SIMBA-UPZ/2440

⁹ BAZNAS RI, "BAZNAS Tekankan Pentingnya Prinsip 3A dalam Pengelolaan Zakat" accessed May 1, 2025. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Tekankan_Pentingnya_Prinsip_3A_dalam_Pengelolaan_Zakat/1355

Kolaborasi antara prinsip 3A dan sistem digital juga perlu diteliti sejauh mana relevansinya dalam mencegah penyalahgunaan dana. Seperti dugaan penyelewengan zakat di BAZNAS Kota Dumai pada tahun 2023 dan BAZNAS Kabupaten Pasaman pada 2024, hal ini menunjukkan bahwa ada dugaan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang belum beradaptasi dengan teknologi dan dapat membuka celah dugaan korupsi.¹⁰ Penelitian Zubaidah dan Afifah menunjukkan bahwa digitalisasi mempermudah pelacakan, pelaporan, dan pemantauan distribusi, sehingga memperkuat akuntabilitas lembaga dan akhirnya risiko penyimpangan dapat ditekan.¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian yang selama ini lebih menyoroti digitalisasi penghimpunan dana, tapi masih belum terfokus pada digitalisasi penyaluran bantuan kebencanaan di BAZNAS yang dipadukan dengan kerangka nilai 3A. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, serta teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan, posisi strategis, dan pengalaman langsung dalam penyaluran dana, pemanfaatan teknologi di BTB serta pengawasan terhadap nilai 3A.¹²

¹⁰ TVRI News "Mantan Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Dituntut 6 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Dana Zakat," accessed, August 9 2025, <https://daerah.tvrinews.com/berita/t9c5bum-mantan-ketua-baznas-kabupaten-pasaman-dituntut-6-tahun-penjara-atas-kasus-korupsi-dana-zakat>

¹¹ Siti Zubaidah and Afifah Afifah, "Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia" *International Conference of Zakat*, December 14, 2020, 459–68, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.227>.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* sehingga temuan data berangkat dari data lapangan.¹³

Kerangka teori awal yang digunakan adalah *Technology, Organization, Environment (TOE) Framework*, yang menganalisis pengaruh faktor teknologi, kondisi internal organisasi, dan tekanan eksternal terhadap adopsi serta efektivitas sistem penyaluran. Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan sistem distribusi dana filantropi kebencanaan, khususnya untuk menjawab tantangan digitalisasi di lingkungan BAZNAS yang berlandaskan nilai normatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama yang relevan dengan tujuan peneliti, yaitu:

1. Bagaimana proses penyaluran dana filantropi dalam kebencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Tanggap Bencana RI ?
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi dalam proses penyaluran dana kebencanaan di BAZNAS Tanggap Bencana RI ?

¹³ Juliet Corbin and Anselm Strauss, "*Basics of Qualitative Research : Fourth Edition*," SAGE Publications, Inc., Fourth Edition, 2014.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif proses penyaluran dana filantropi kebencanaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS, sekaligus mengidentifikasi tahapan dan mekanisme yang terlibat di dalamnya. Selain itu, penelitian ini berupaya mengetahui bentuk pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam mendukung proses penyaluran dana kebencanaan, serta menilai efektivitas penerapannya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyaluran yang dijalankan oleh BAZNAS Tanggap Bencana, dan menilai sejauh mana sistem tersebut selaras dengan nilai-nilai 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) yang menjadi pedoman normatif lembaga. Lebih jauh, penelitian ini menganalisis secara mendalam praktik penyaluran dana filantropi dalam kebencanaan oleh BAZNAS Tanggap Bencana RI guna memberikan gambaran utuh mengenai dinamika, tantangan, dan peluang perbaikan di masa mendatang.

2. Signifikansi Penelitian

Nilai atau dampak dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam beberapa aspek berikut :

a. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemanfaatan TOE *Framework* dalam konteks sistem penyaluran dana filantropi berbasis khususnya di lembaga keagamaan. Jika sebelumnya TOE lebih banyak digunakan dalam studi adopsi teknologi di sektor komersial atau pemerintahan, maka dalam penelitian ini TOE digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur kelembagaan, kesiapan teknologi, dan tekanan lingkungan eksternal memengaruhi efektivitas penyaluran dana kebencanaan di lembaga filantropi BAZNAS khususnya di unit BTB.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memadukan TOE *Framework* dengan nilai-nilai 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) sebagai prinsip normatif yang hidup dalam praktik kelembagaan BAZNAS yang sering digaungkan. Penggunaan nilai 3A sebagai pendekatan evaluatif memperkaya pendekatan teoritis yang menekankan keseimbangan antara efisiensi sistem dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keislaman, peraturan dan kebangsaan.

b. Signifikansi Metodologis

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan *grounded theory* sebagai alat analisis, menggabungkan proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*, berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai informan dari beberapa lintas unit kerja di BAZNAS RI. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali data yang bersifat mendalam dan kontekstual, serta menyusun analisis yang tidak hanya menjelaskan prosedur

formal, tetapi juga dinamika operasional di lapangan dan praktik adaptif para pelaksana program kebencanaan.

Selain itu, kombinasi antara pengalaman langsung peneliti sebagai bagian dari tim lapangan sebelum proses penelitian, dan triangulasi dengan data dokumentasi kelembagaan (seperti MPZIS, FPPD, dan SITREP), memberikan kedalaman perspektif yang khas. Hal ini memberikan kontribusi dalam metodologi studi kelembagaan berbasis pengalaman dalam konteks kebencanaan.

c. Signifikansi Praktis

Penelitian ini memberikan sumbangan praktis yang relevan bagi BAZNAS RI maupun lembaga zakat lainnya yang terlibat dalam penyaluran dana filantropi kebencanaan. Temuan-temuan dalam penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang berjalan saat ini, serta mendorong pentingnya:

- 1) Percepatan digitalisasi proses approval dan pelaporan kebencanaan.
- 2) Pengembangan sistem terintegrasi yang mendukung pelaporan secara *real-time*, termasuk teknologi yang memungkinkan digunakan pada wilayah terdampak bencana yang sulit sinyal.
- 3) Penataan terkait alur otorisasi agar lebih responsif dan menjaga nilai 3A terhadap situasi darurat.
- 4) Penguatan SDM di unit-unit strategis seperti teknologi informasi, keuangan, monitoring evaluasi dan unit lain.

- 5) Penuntasan perumusan indikator teknis nilai 3A agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang baku, khususnya dalam konteks audit internal, pengawasan terhadap efektivitas penyaluran, maupun untuk acuan BAZNAS Daerah dalam menerapkan indikator turunan nilai 3A.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan oleh pemangku kepentingan di luar BAZNAS, seperti kementerian, mitra atau pemangku kepentingan di daerah bencana, untuk memahami bagaimana tantangan kolaborasi, sistem pelaporan, dan koordinasi dapat disikapi secara lebih konstruktif ke depan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan terhadap model ideal adopsi teknologi di lembaga filantropi.

Melalui wawancara, ditemukan bahwa pengembangan teknologi di BAZNAS tidak selalu mengacu pada pendekatan teknologi tinggi seperti *blockchain* atau *big data* secara langsung, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sistem terpadu yang relevan, aplikatif dan humanis, misalnya seperti rancangan *super apps* yang bisa mengintegrasikan pencatatan bantuan atau penyintas, proses asesmen, pelaporan kebencanaan, audit berbasis SOP, kerelawanan, ataupun layanan masyarakat seperti keterbukaan informasi, program kampanye penghimpunan dana terkait kebencanaan atau pelaporan dan pencarian keluarga yang terdampak bencana (seperti dahulu di BAZNAS pernah membuat aplikasi cari temu).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa adopsi inovasi teknologi dalam lembaga filantropi perlu dikembangkan secara kontekstual, berbasis kebutuhan kelembagaan dan kesiapan sumber daya, bukan sekadar mengikuti tren teknologi global. Lebih lanjut, salah satu arah pengembangan yang disarankan dalam konteks kelembagaan seperti BAZNAS adalah pemanfaatan teknologi yang bersifat tepat guna dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Misalnya, pengembangan sistem berbasis *Geographic Information System* (GIS) yang terhubung dengan penyedia peta daring seperti *Google Maps* atau *Waze*, untuk memudahkan BTB merespons wilayah terdampak secara *real-time*, mengetahui kondisi akses jalan, titik pengungsian, dan potensi jalur distribusi bantuan. Kolaborasi dengan penyedia data spasial ini akan membantu mempercepat pengambilan keputusan di tengah kondisi bencana yang berubah cepat.

Selain itu, pengembangan aplikasi *mobile offline-compatible* yang memungkinkan pelaporan dari daerah tanpa sinyal, serta integrasi *dashboard* pelaporan kebencanaan, menjadi bentuk inovasi teknologi yang lebih mendekati realitas operasional di lapangan. Teknologi yang diusulkan tidak bertujuan menggantikan seluruh sistem yang sudah ada, tetapi sebagai bagian yang mendukung dan melengkapi infrastruktur digital yang ada di BAZNAS.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menyadari terdapat sejumlah keterbatasan yang memengaruhi ruang lingkup analisis dan kedalaman data yang dapat dicapai. Keterbatasan tersebut

dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek, yaitu teoritis, metodologis, non-teoritis, dan non-metodologis.

a. Keterbatasan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan TOE *Framework* sebagai kerangka utama dan nilai 3A sebagai pendekatan evaluatif. Namun, TOE belum secara spesifik dirancang untuk konteks filantropi berbasis agama atau kebencanaan. Oleh karena itu, penerapan TOE dalam penelitian ini perlu disesuaikan dengan konteks kelembagaan zakat seperti BAZNAS. Begitu pula dengan pendekatan nilai 3A, yang belum memiliki indikator turunan yang baku pada saat penelitian dilakukan, sehingga pengukuran prinsip Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI masih bersifat deskriptif dan kontekstual, belum dalam bentuk evaluatif terstandar.

b. Keterbatasan Non Teoritis

Penelitian ini juga dihadapkan pada keterbatasan eksternal di tingkat kelembagaan. Beberapa sistem di BAZNAS, seperti sistem pelaporan kebencanaan dan approval digital, masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Selain itu, masih sedikitnya integrasi sistem antara BAZNAS RI dan mitra lembaga eksternal (seperti KEMENSOS, BPBD, ataupun DJP) juga menjadi tantangan dalam mengakses data lintas lembaga secara terbuka yang masih belum terselesaikan. Keterbatasan SDM dan proses verifikasi dan

pelaporan yang masih dilakukan secara manual di beberapa bagian menyulitkan peneliti untuk menelusuri data secara utuh dan menyeluruh.

c. Keterbatasan Non Metodologis

Selain keterbatasan teoritis, metodologis, dan non-teoritis, penelitian ini juga menghadapi tantangan tersendiri dari sisi personal peneliti. Salah satu tantangan utama adalah posisi peneliti yang saat penelitian berlangsung masih aktif sebagai karyawan di BAZNAS RI. Hal ini membuat peneliti harus menjaga profesionalisme sekaligus berusaha menjaga objektivitas selama proses pengumpulan data. Dalam praktiknya, posisi ini justru membatasi ruang eksplorasi wawancara karena sebagian informan berada dalam satu struktur kerja, dan komunikasi formal cenderung menciptakan jarak profesional, karena posisi peneliti sebagai bagian dari struktur organisasi menuntut keseimbangan antara kedekatan dan objektivitas.

Selain itu, keterbatasan waktu informan menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar informan memiliki jabatan struktural di atas level staf dengan jadwal kerja yang cukup padat, sehingga penjadwalan ulang wawancara kerap terjadi dan membatasi waktu eksplorasi mendalam. Kondisi ini diperberat dengan adanya dua momen besar umat Islam dalam kalender kelembagaan, yaitu Ramadhan dan Idul Adha, yang menjadi periode kerja paling padat bagi lembaga filantropi seperti BAZNAS. Akibatnya, proses penelitian baru dapat dilakukan secara intensif setelah rangkaian kegiatan Idul Adha selesai.

Dari sisi kapasitas pribadi, peneliti juga menyadari bahwa sebagai peneliti pemula dalam metode kualitatif, teknik wawancara dan strategi eksplorasi data masih memerlukan penguatan. Pada beberapa kesempatan, peneliti merasa belum optimal dalam menggali informasi terlebih lagi ketika pertanyaan yang disampaikan terpaku pada panduan wawancara, sehingga suasana diskusi dengan informan belum sepenuhnya cair. Di sisi lain, diperlukan strategi khusus agar informan merasa nyaman dan sedikit terbuka dalam menyampaikan informasi yang lebih dalam.

D. Kajian Pustaka

1. Filantropi Islam dan Pengelolaan Dana ZIS dalam Kebencanaan

Filantropi dalam Islam merupakan manifestasi dari nilai-nilai solidaritas sosial yang diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual saja, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, zakat diwajibkan bagi umat Islam yang memenuhi syarat, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan membantu delapan golongan penerima manfaat (asnaf). Infak dan sedekah yang bersifat sunnah pun punya peran penting dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk pada saat krisis atau

bencana. Wakaf, di sisi lain, berperan dalam pembangunan jangka panjang melalui penyediaan aset produktif untuk kepentingan umum.¹⁴

Dalam kerangka tersebut di atas, pengelolaan dana ZIS tidak hanya diarahkan pada pemberdayaan masyarakat miskin dalam konteks normal, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam merespons situasi bencana. Penelitian oleh Jamilullah menunjukkan bahwa wakaf dapat dijadikan sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan pemulihan bencana, seperti membangun fasilitas layanan publik atau hunian sementara.¹⁵ Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Al-Daihani *et al.* menekankan bahwa keuangan sosial Islam termasuk zakat dan wakaf dapat terintegrasi dalam strategi manajemen risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Prinsip pengelolaan zakat juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan kolektif. Hal ini menjadi relevan dalam konteks kebencanaan, di mana distribusi bantuan harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Makhrus, “*Dinamika dan aktivisme filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat*” (Yogyakarta: Litera, 2018).

¹⁵ Hendra Pertaminaawati, “*Peran Filantropi Islam Wakaf dalam Kebencanaan,*” *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 8, no. 1 (January 7, 2025): 21–44, <https://doi.org/10.24853/ma.8.1.21-44>.

¹⁶ Meshari Al-Daihani et al., “*Islamic Social Finance and Its Potential in Addressing Natural Disaster Emergencies and Advancing Sustainable Development Goals: A Proposed Model*” *International Journal of Ethics and Systems*, March 24, 2025, <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2024-0138>.

telah menunjukkan peran aktif dalam penyaluran dana zakat dan sedekah untuk korban bencana, baik dalam bentuk logistik darurat maupun rehabilitasi pascabencana.¹⁷

Dalam konteks kebencanaan, pengelolaan dana ZIS tidak hanya menekankan pada ketepatan sasaran dan kebermanfaatan, tetapi juga pada kecepatan distribusi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen penyaluran yang meliputi perencanaan berbasis kebutuhan wilayah terdampak, pelaksanaan distribusi yang fleksibel namun terstandar, serta pengawasan dan pelaporan yang transparan. Sebagai bagian dari modernisasi tata kelola zakat, BAZNAS mengembangkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS secara nasional. Sistem ini juga menjadi dasar pelaporan yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan ketentuan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh seluruh unit pelaksana zakat wajib dilakukan secara berkala melalui SIMBA. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem pengendalian internal, tetapi juga memastikan transparansi publik, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kepercayaan

¹⁷ Muhammad Agip Tuankumala and Diah Arminingsih, “Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalimantan Barat,” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam 1* (2023): 173–179.

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.¹⁸ Sisi lain tantangan tetap ada, terutama dalam integrasi sistem digital yang menyeluruh dan peningkatan literasi digital di kalangan pengelola dan penerima manfaat.

Dalam situasi darurat, percepatan distribusi ZIS dapat menjadi salah satu sumber daya utama dalam bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, kejelasan asnaf, keakuratan data mustahik, serta ketepatan sasaran menjadi prinsip penting dalam implementasi filantropi Islam berbasis bencana. Strategi pengelolaan yang efektif mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program kerja di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prihoetami dan Niswah menjelaskan bahwa wakaf dan instrumen filantropi lainnya dapat difungsikan sebagai dana cadangan tanggap bencana, dengan strategi penyaluran yang meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pascabencana.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa filantropi

¹⁸ BAZNAS RI, “*PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya*,” accessed July 3, 2025, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>.

¹⁹ Siti Mardiah “*Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam*” *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>.

²⁰ Astanti Prihoetami and Farokhah Muzayinatun Niswah, “*Wakaf sebagai Sumber Dana Penanggulangan Kebencanaan di Indonesia*” *bwi.go.id*, accessed July 5, 2025, <https://www.bwi.go.id/9334/2024/02/07/wakaf-sebagai-sumber-dana-penanggulangan-kebencanaan-di-indonesia/>

Islam tidak hanya bersifat bantuan langsung sesaat, tetapi juga memiliki orientasi jangka panjang dalam pemulihan sosial. Dalam pengelolaannya, Mardiah menegaskan pentingnya perencanaan strategis oleh lembaga zakat agar distribusi dana tidak bersifat reaktif, melainkan responsif dan terukur.²¹

2. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi

Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan serangkaian tindakan seperti mengantisipasi, merespons, dan memulihkan dampak bencana secara terkoordinasi. Tujuan utama dari penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap kehidupan manusia, harta benda, dan lingkungan, dengan cara kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.²²

Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan manajemen bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi acuan utama dalam penanganan kebencanaan secara nasional. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penanggulangan bencana dipandang sebagai urusan bersama

²¹ Siti Mardiah, “Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam,” *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>.

²² Marzuki Sinambela et al., “Mitigasi dan Manajemen Bencana”, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya, dengan pendekatan komprehensif dan multisektor.²³

Selain aspek kelembagaan, manajemen bencana juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat sekitar. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen *Indonesia Disaster Management Reference Handbook* oleh *Pacific Disaster Center* (PDC), pendekatan manajemen bencana yang efektif harus bersifat menyeluruh, responsif, dan mampu mengadaptasi tantangan wilayah rawan bencana seperti Indonesia.²⁴

Secara konseptual, siklus penanggulangan bencana terbagi dalam 3 fase yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana, yang masing-masing melibatkan strategi mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.²⁵ Pendekatan ini menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar reaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencakup persiapan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan masyarakat. BNPB menggarisbawahi bahwa setiap fase memiliki fungsi spesifik, mulai dari edukasi masyarakat, perencanaan kontinjensi, sistem peringatan dini, penyelamatan, hingga rekonstruksi sosial-ekonomi.²⁶

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”, accessed July 4, 2025, <https://web.bnpb.go.id/jdih/download>.

²⁴ Pacific Disaster Center. “Indonesia National Disaster Preparedness Baseline Assessment.” Hawaii: PDC, 2020, accessed July 3, 2025, https://www.pdc.org/wp-content/uploads/NDPBA_IDN_Final_Report_Bahasa.pdf.

²⁵ Marzuki Sinambela et al., “Mitigasi dan Manajemen Bencana”, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)

²⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Pedoman Sosialisasi Penanggulangan Bencana”, accessed July 3, 2025, <https://bnpb.go.id/pedoman-sosialisasi-penanggulangan-bencana>.

Dalam praktiknya, pendekatan ini digunakan juga diterapkan oleh lembaga filantropi seperti BAZNAS Tanggap Bencana, dimana program BTB ini berjalan melalui tiga subprogram yakni: (1) Penanganan kebencanaan melalui langkah *rescue*, *relief*, *recovery*, dan *reconstruction* untuk korban bencana; (2) Penanganan Risiko Bencana (PRB) melalui edukasi kebencanaan; (3) Kerelawanan melalui rekrutmen dan pelatihan relawan.²⁷

Sisi lain teknologi informasi (TI) memegang peran yang cukup penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen bencana, terutama dalam hal koordinasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Seperti penggunaan Sistem Informasi Geospasial (SIG) telah memungkinkan visualisasi wilayah terdampak, perencanaan evakuasi, serta distribusi logistik secara lebih akurat dan *real-time*. Menurut BNPB, sistem ini juga mendukung integrasi data antar lembaga dan peningkatan kapasitas tanggap darurat di tingkat daerah.²⁸

Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* menunjukkan bahwa model komunikasi terpadu berbasis web mampu mempercepat penyebaran informasi di lapangan serta meningkatkan koordinasi antar instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Karo.²⁹ Sementara itu, studi lain yang dilakukan oleh Aulia tentang

²⁷ BAZNAS RI, “*Profil BAZNAS Tanggap Bencana*” accessed July 3, 2025, <https://baznas.go.id/program/kebencanaan>.

²⁸ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) “*Geo Portal Data Bencana Indonesia 2024*”, accessed July 3, 2025, <https://gis.bnpb.go.id/>.

²⁹ Puji Lestari *et al.*, “*Model Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana di Kabupaten Karo Berbasis Web*,” *Jurnal Komunikasi* 16, no. 1 (October 29, 2021): 47–62, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss1.art4>

pengembangan aplikasi *mobile* mitigasi bencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaporan kondisi darurat secara langsung kepada lembaga terkait.³⁰ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa integrasi teknologi informasi dalam manajemen kebencanaan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membuka ruang bagi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas.

Dalam konteks penyaluran bantuan kebencanaan, integrasi teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung prinsip kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas, hal ini sejalan dengan pembahasan artikel “*From digital promise to frontline practice*” yang dipublish oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) tahun 2025.³¹ Salah satu cara untuk memetakan kebutuhan berdasarkan data terdampak, memverifikasi penerima manfaat, serta mendistribusikan bantuan secara efisien melalui sistem pelaporan dan pelacakan dengan berbasis digital. Studi oleh Rizaludin menyatakan bahwa digitalisasi zakat mampu memperkuat akuntabilitas lembaga zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana filantropi.³² Namun, adopsi teknologi dalam

³⁰Agustina Anjani Aulia, “*Perancangan Aplikasi Mobile Android dalam Program Mitigasi Bencana (Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa)*” (Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia, 2023), <https://repository.stiki.ac.id/2125/>.

³¹ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), “*From Digital Promise to Frontline Practice: New and Emerging Technologies in Humanitarian Action*”, accessed July 16, 2025, <https://www.unocha.org/publications/report/world/digital-promise-frontline-practice-new-and-emerging-technologies-humanitarian-action>.

³² Muhammad Rizaludin As, “*Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia*,” *TADABBUR: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>.

penyaluran bantuan kebencanaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur jaringan, dan literasi digital.

Studi oleh Srilestari dalam forum ICONZ BAZNAS mengemukakan bahwa transformasi digital dalam filantropi Islam pascapandemi COVID-19 tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategi keberlanjutan kelembagaan.³³ Digitalisasi terbukti mampu mempercepat proses pengumpulan, mempermudah pelaporan, dan membuka peluang untuk integrasi distribusi zakat secara transparan dan tepat sasaran.

3. Digitalisasi Lembaga Filantropi

Transformasi digital telah mengubah cara lembaga-lembaga filantropi mengelola, menyalurkan, dan melaporkan penggunaan dana sosial. Digitalisasi memungkinkan efisiensi dalam verifikasi data mustahik, penyaluran dana secara langsung, pelacakan bantuan secara *real-time*, serta peningkatan transparansi kepada publik. Dalam konteks kebencanaan, adopsi sistem digital juga mendukung respon cepat, pencatatan data korban, dan koordinasi lintas unit secara daring. Namun, implementasi teknologi di sektor filantropi keagamaan seperti zakat masih menghadapi tantangan struktural, termasuk keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan kebutuhan akan kesesuaian syariah.

Studi yang dilakukan oleh Pulungan *et al.* menegaskan bahwa digitalisasi dalam lembaga zakat membawa peluang signifikan dalam aspek efisiensi operasional dan

³³ Srilestari, Eka Puji, "Navigating the New Normal: Digital Transformation and Islamic Social Finance Strategies," *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, 2023, 187–96, <https://doi.org/10.37706/iconz.2023.685>.

perluasan jangkauan penerima manfaat. Melalui pemanfaatan aplikasi berbasis web, integrasi *database* mustahik, dan kanal penyaluran digital, lembaga zakat dapat mengoptimalkan proses distribusi dana sosial secara lebih sistematis dan terukur. Namun demikian, studi ini juga menggarisbawahi adanya tantangan nyata yang dihadapi lembaga, seperti rendahnya literasi digital di kalangan amil, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi (TI) antarwilayah, serta belum adanya sistem digital khusus untuk penyaluran bantuan kebencanaan secara *real-time*.³⁴

Penelitian oleh Septiarini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan zakat mampu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, serta mempercepat proses administrasi dan pelaporan.³⁵ Sementara itu, Rakhmawati menekankan bahwa strategi *digital fundraising* tidak hanya efektif dalam menekan biaya operasional, tetapi juga memperluas jangkauan partisipasi masyarakat.³⁶ Meskipun demikian, sebagian besar praktik digitalisasi di lembaga filantropi Islam masih terfokus pada aspek penghimpunan dana (hulu), sedangkan pada aspek penyaluran (hilir), banyak lembaga masih bergantung pada prosedur manual yang bersifat konvensional.

³⁴ Sulaika Pulungan et al., “*The Digital Innovation in Zakat Collection and Distribution: Opportunities and Challenges*,” in *Proceedings of the 8th International Conference of Zakat (ICONZ)*, 2024, 423–432, <https://doi.org/10.37706/iconz.2024.911..>

³⁵ Dina Fitriisa Septiarini, “*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya*,” *Akrual: Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2011): 172–199, <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>.

³⁶ Fatkur Huda et al., “*Strategi Digital Fundraising dalam Peningkatan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lazismu Jombang*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 115–120, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12118>.

Dalam konteks kebencanaan yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas tinggi, sedangkan berdasarkan penelitian oleh Taber *et al.* penggunaan metode digital lebih mempercepat ketersediaan data dari pada metode berbasis kertas.³⁷ Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam proses penyaluran dana filantropi menjadi kebutuhan strategis, tidak hanya sebagai respon terhadap tuntutan publik, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen terhadap nilai syar’i, regulasi, dan amanah kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi celah kajian yang belum banyak membahas proses penyaluran dana filantropi kebencanaan secara mendalam, khususnya dalam konteks digitalisasi dan penerapan nilai-nilai kelembagaan seperti nilai 3A yang diterapkan oleh BAZNAS.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini terbagi dua yaitu kerangka konseptual dan kerangka teori untuk memetakan dan menganalisis penyaluran dana filantropi kebencanaan, untuk melihat keterkaitan antara konteks sosial dan geografis, konteks operasional kelembagaan, dan nilai-nilai nilai 3A yang digunakan dalam praktik distribusi bantuan di BTB. Ketiga konteks tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman awal mengenai lingkungan di mana sistem penyaluran dijalankan.

Kemudian, untuk memahami bagaimana sistem penyaluran dana diformulasikan dan dijalankan secara operasional, awal penelitian ini menggunakan

³⁷ Niloufer Taber et al., “*Paper Versus Digital Data Collection Methods for Road Safety Observations: Comparative Efficiency Analysis of Cost, Timeliness, Reliability, and Results*,” *Journal of Medical Internet Research* 22, no. 5 (2020): e17129, <https://doi.org/10.2196/17129>.

teori TOE *Framework*. Sebagai sarana untuk peneliti menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi adopsi dan implementasi teknologi dalam sistem penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS. Melalui analisis pada tiga dimensi utama teknologi, organisasi, dan lingkungan penelitian ini menguraikan apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam proses penyaluran dana, khususnya saat bencana.

1. Kerangka Konseptual

a. Filantropi Islam dan Prinsip Kerja ZIS

Filantropi Islam merupakan wujud dari ajaran Islam dalam membangun solidaritas sosial dan redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Keempat instrumen ini berperan sebagai ibadah sekaligus mekanisme sosial yang memperkuat keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat.³⁸

Zakat sebagai pilar utama filantropi Islam bersifat wajib (*fardhu*) dan memiliki aturan distribusi yang ketat kepada delapan golongan (*asnaf*), sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sementara itu, infak dan sedekah bersifat sukarela namun memiliki dampak sosial yang luas karena fleksibilitasnya dalam menjangkau masyarakat rentan, termasuk di luar kategori mustahik zakat. Penelitian oleh Rizaludin menunjukkan bahwa sedekah dan infak

³⁸ Makhrus, “*Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*” (Yogyakarta: Litera, 2018)

menjadi instrumen strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan responsif, khususnya pada masa krisis.³⁹

Dalam kerangka kelembagaan seperti BAZNAS, filantropi Islam dijalankan secara formal dan profesional, mengikuti sistem pelaporan keuangan yang terstandar dan diawasi oleh negara. Mardiah mencatat bahwa pengelolaan dana ZISWAF oleh BAZNAS menggabungkan nilai syar'i, efisiensi kelembagaan, dan adaptasi teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat lebih luas.⁴⁰

Nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai nilai etis, tetapi juga menjadi standar operasional kelembagaan yang mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya dalam kondisi darurat seperti bencana. Dalam konteks ini, nilai Aman Syar'i menuntut kehati-hatian dalam validasi penerima manfaat (mustahik), Aman Regulasi memastikan tata kelola sesuai perundang-undangan zakat, dan Aman NKRI memastikan bahwa distribusi dana tidak memicu ketimpangan sosial dan mendukung stabilitas nasional. Hal ini ditegaskan oleh BAZNAS melalui berbagai forum sosialisasi dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023, yang mendorong implementasi nilai 3A dalam seluruh aktivitas pengelolaan zakat.⁴¹

³⁹ Muhammad Rizaludin As, "Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia," *TADABBUR: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>.

⁴⁰ Siti Mardiah, "Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam," *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>.

⁴¹ BAZNAS RI. "Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panduan Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Zakat". Jakarta: BAZNAS, 2023.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, ZIS tidak hanya dianalisis sebagai sumber pembiayaan program kebencanaan, melainkan juga sebagai representasi dari nilai-nilai kelembagaan dan prinsip kerja organisasi. Ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai normatif tersebut memengaruhi pemanfaatan teknologi, pengambilan keputusan, dan efektivitas penyaluran dana filantropi dalam kebencanaan.

b. Kebencanaan sebagai Konteks Sosial Penyaluran Dana

Dari sisi kebencanaan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, yang dipengaruhi oleh posisi geografisnya yang berada di jalur Cincin Api Pasifik dan zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), Indonesia mengalami lebih dari 12.000 kejadian bencana, yang menyebabkan jutaan jiwa terdampak dan ribuan fasilitas umum mengalami kerusakan.⁴²

Situasi tersebut menuntut hadirnya sistem manajemen bencana yang tidak hanya berbasis negara, tetapi juga melibatkan peran masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan filantropi. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor

⁴² Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Geo Portal Data Bencana Indonesia 2024,” accessed July 3, 2025, <https://gis.bnpb.go.id/>.

24 Tahun 2007 telah menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam konteks ini, partisipasi lembaga filantropi seperti BAZNAS menjadi penting sebagai bagian dari aktor nonnegara yang terlibat dalam distribusi bantuan bencana.

Konteks kebencanaan menuntut pendekatan distribusi dana yang berbeda dari situasi normal. Proses penyaluran dalam kondisi darurat harus bersifat cepat, tepat sasaran, dan akuntabel, dengan mekanisme pelaporan yang memungkinkan transparansi dan evaluasi cepat. Oleh karena itu, lembaga seperti BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dituntut untuk tidak hanya memiliki sumber daya dana yang kuat, tetapi juga sistem penyaluran yang adaptif dan terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memetakan dampak, mengelola logistik, serta memastikan keadilan distribusi bantuan. Di sinilah kolaborasi antara lembaga negara dan lembaga zakat menjadi sangat relevan untuk menjawab kebutuhan distribusi bantuan secara efektif dan berkelanjutan.

c. Transformasi Digital dan Konteks Operasional BAZNAS

Transformasi digital dalam pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia merupakan respons terhadap kebutuhan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga, terutama dalam konteks kebencanaan yang menuntut respons cepat dan tepat. BAZNAS sebagai lembaga negara yang mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nasional telah melakukan berbagai inovasi digital untuk memperkuat sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Sistem

informasi seperti SIMBA, SIMKEU, serta penggunaan *dashboard* dan aplikasi pelaporan lapangan menjadi bagian dari upaya modernisasi kelembagaan berbasis teknologi informasi.

Digitalisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang terdokumentasi, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Zubaidah dan Afifah menyatakan bahwa sistem digital seperti SIMBA dan layanan aplikasi muzaki telah membantu memperkuat pelacakan, pelaporan, dan kredibilitas lembaga zakat.⁴³ Rizaludin juga menegaskan bahwa pemanfaatan sistem digital memperkuat akuntabilitas dan transparansi distribusi, serta meningkatkan kepercayaan publik, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi atau bencana alam.⁴⁴

Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh Tuankumala dan Arminingsih, tantangan transformasi digital di lembaga filantropi terletak pada aspek operasional penyaluran, yang seringkali masih menggunakan pendekatan konvensional.⁴⁵ Hal ini menciptakan kesenjangan antara kemajuan di sisi penghimpunan dan efektivitas

⁴³ Siti Zubaidah and Afifah Afifah, "Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia" *International Conference of Zakat*, December 14, 2020, 459–68, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.227>.

⁴⁴ Muhammad Rizaludin As, "Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia," *TADABBUR: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>.

⁴⁵ Muhammad Agip Tuankumala and Diah Arminingsih, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalimantan Barat," *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1 (2023): 173–179.

di sisi pendistribusian. Maka dari itu, adopsi teknologi harus dibarengi dengan kesiapan organisasi dan adaptasi kelembagaan di lapangan.

Transformasi digital di BAZNAS juga berjalan dalam kerangka nilai-nilai kelembagaan, khususnya prinsip 3A Surat Edaran BAZNAS No. 5 Tahun 2023 dan PERBAZNAS No. 1 Tahun 2023 secara eksplisit mendorong integrasi sistem digital dengan prinsip tata kelola zakat yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, transformasi digital di BAZNAS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh konteks operasional yang mencakup struktur organisasi, dukungan regulasi, kapasitas SDM, dan tuntutan sosial dari masyarakat pengguna layanan filantropi.

d. Nilai 3A sebagai Prinsip Kelembagaan Pengelolaan Dana Filantropi

Nilai 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) merupakan prinsip kelembagaan yang dicanangkan oleh BAZNAS untuk menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan norma agama, hukum negara, dan kepentingan integrasi nasional. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman etik, tetapi juga diterjemahkan ke dalam sistem kerja, pengambilan keputusan, dan penyusunan kebijakan di tingkat operasional.

Aman Syar'i merujuk pada keharusan bahwa penyaluran dana dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam, termasuk keabsahan penerima (asnaf), validitas data mustahik, dan tujuan penggunaan dana. Aspek ini mendorong kehati-hatian dalam proses verifikasi, agar dana benar-benar sampai kepada yang berhak secara syar'i.

Validasi penerima manfaat melalui klasifikasi mustahik dalam SIMBA menjadi salah satu wujud implementasi nilai ini.

Aman Regulasi menekankan bahwa tata kelola ZIS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk pelaporan melalui sistem yang ditentukan. PERBAZNAS No. 1 Tahun 2023 mewajibkan seluruh Unit Pelaksana Zakat (UPZ) untuk melaporkan kegiatan melalui sistem SIMBA secara berkala. Ini menjadi dasar sistem pelaporan digital BAZNAS yang terintegrasi.

Aman NKRI mencerminkan komitmen BAZNAS untuk memastikan bahwa program dan distribusi dana tidak menimbulkan konflik sosial, bias sektarian, atau ketimpangan antarwilayah. Dalam konteks kebencanaan, prinsip ini menjadi penting untuk menjamin bahwa bantuan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu, melainkan merata, tepat sasaran, dan memperkuat solidaritas kebangsaan.

Penerapan nilai 3A tidak lepas dari tantangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua indikator teknis dari prinsip tersebut terdokumentasi secara rinci, dan pelaksanaannya masih bersifat normatif. Meski demikian, prinsip 3A tetap menjadi bingkai utama dalam memahami praktik digitalisasi dan strategi penyaluran dana kebencanaan oleh BAZNAS.

2. Kerangka Teori (TOE *Framework*)

Sebelum TOE *Framework* dikembangkan secara sistematis oleh Tornatzky dan Fleischer, kajian tentang adopsi teknologi dalam organisasi telah dilakukan oleh berbagai peneliti yang menekankan bahwa keberhasilan inovasi tidak semata-mata

ditentukan oleh kecanggihan teknologi itu sendiri, melainkan juga oleh konteks organisasi dan pengaruh eksternal yang menyertainya. Salah satu karya penting yang mendasari pemikiran ini adalah *The Processes of Technological Innovation*, Tornatzky pada tahun 1982, yang menunjukkan bahwa proses adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat organisasi beroperasi, dinamika internal lembaga, serta proses interaksi antara pengembang teknologi dan pengguna akhir. Dalam studi tersebut, Tornatzky menegaskan pentingnya pendekatan sistemik yang tidak hanya melihat pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan sosial dan institusional dari organisasi untuk menyerap inovasi secara efektif.

Laporan dari *National Research Council* juga mendukung perspektif ini, dengan menyatakan bahwa keberhasilan adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, proses manajemen perubahan, dan hubungan eksternal antar pemangku kepentingan.⁴⁶ Begitu pula pembahasan dalam artikel “*The Technology, Organization, Environment Framework*” oleh Baker, disebutkan bahwa *TOE Framework* lahir sebagai respons atas kebutuhan model analisis yang dapat menjelaskan adopsi inovasi dalam berbagai konteks organisasi, terutama dalam era modern yang diwarnai oleh tekanan eksternal, kemajuan teknologi cepat, dan kebutuhan efisiensi internal.⁴⁷

⁴⁶ National Research Council, “*Appendix B: Processes of Technological Innovation, in The Role of Public Agencies in Fostering New Technology and Innovation in Building*” (Washington, DC: National Academies Press, 1992), accessed July 17, 2025, <https://nap.nationalacademies.org/read/2070/chapter/9>.

⁴⁷ Jeffrey Baker, “*The Technology–Organization–Environment Framework*,” in *Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society*, vol. 1, ed. Yogesh K. Dwivedi, Michael

Dengan demikian, TOE *Framework* dianggap sebagai kerangka yang relevan untuk menganalisis proses adopsi teknologi di lembaga seperti BAZNAS karena mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan. Sebagai model konseptual, TOE tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu organisasi mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi teknologi, tetapi juga memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas distribusi dana di era digital. Dalam konteks lembaga sosial-keagamaan seperti BAZNAS, pendekatan ini memberi ruang untuk mengkaji kesiapan teknologi, struktur dan kapasitas organisasi, serta tekanan regulatif dan nilai-nilai sosial yang membentuk karakter institusionalnya.

a. Dimensi Teknologi (*Technology Context*)

Dalam TOE *Framework* dimensi teknologi merujuk pada berbagai aspek teknis yang relevan dengan proses adopsi dan implementasi teknologi dalam suatu organisasi. Dimensi ini mencakup baik teknologi yang telah digunakan maupun yang tersedia untuk digunakan, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, manfaat relatif, kesesuaian dengan proses kerja, dan hambatan teknis.

Dimensi ini mencakup semua aspek teknis yang tersedia dan digunakan dalam proses penyaluran dana, seperti aplikasi pelaporan, sistem monitoring

bantuan, *dashboard* data mustahik, serta platform SIMBA. Aspek ini menilai kemudahan, manfaat relatif, integrasi, dan hambatan teknis dalam pengadopsian teknologi. Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian diarahkan pada sejauh mana sistem digital telah digunakan, dan bagaimana teknologi memengaruhi kecepatan dan transparansi distribusi dana.

Dimensi ini mencakup beberapa unsur utama yang memengaruhi pemanfaatan teknologi. Pertama, ketersediaan teknologi, yakni sejauh mana infrastruktur digital telah tersedia dan dapat dimanfaatkan. Kedua, kesesuaian teknologi, yang menekankan pentingnya keselarasan antara sistem yang ada dengan kebutuhan serta prosedur kerja yang berlaku. Selanjutnya, kemudahan penggunaan menjadi faktor penting agar teknologi dapat diakses dan dioperasikan dengan mudah oleh pengguna. Selain itu, terdapat manfaat relatif yang ditawarkan, seperti efisiensi waktu, peningkatan pengawasan, dan akurasi data yang lebih baik. Namun, dimensi ini juga tidak lepas dari hambatan teknis, misalnya kendala sinyal, kesalahan input, atau perlunya pelatihan tambahan bagi pengguna.

Selain itu, unsur penting lainnya adalah keamanan sistem, terutama untuk perlindungan data mustahik, serta integrasi antar sistem, agar proses lintas unit berjalan lancar tanpa duplikasi data. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada sejauh mana teknologi sudah diterapkan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyaluran dana.

b. Dimensi Organisasi (*Organization Context*)

Dalam TOE *Framework*, dimensi organisasi merujuk pada karakteristik internal dari suatu lembaga yang memengaruhi keputusan adopsi dan implementasi teknologi. Upaya untuk menjelaskan bahwa keputusan inovasi dalam suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, sumber daya, budaya kerja, serta dukungan dari pimpinan organisasi.

Dalam konteks BTB, dimensi organisasi merujuk pada faktor internal lembaga, seperti struktur manajemen, kapasitas SDM, Standar Operasional Prosedur (SOP), budaya organisasi, serta komitmen pimpinan terhadap inovasi. BAZNAS, sebagai lembaga zakat negara, memiliki struktur birokrasi yang kompleks, sehingga adopsi teknologi sangat tergantung pada koordinasi antar-unit dan kesiapan sumber daya manusia di bidang distribusi, IT, dan keuangan.

Dimensi organisasi mencakup sejumlah unsur penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi teknologi. Struktur organisasi berperan dalam menentukan kelincihan pengambilan keputusan dan efektivitas pelaksanaan teknologi, karena birokrasi atau hierarki yang terlalu kaku dapat memperlambat proses. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor krusial, mencakup kesiapan pegawai dari sisi jumlah, keterampilan, dan pengetahuan untuk mengoperasikan teknologi. Standar operasional prosedur (SOP) juga berperan penting sebagai pedoman formal yang mengatur proses digitalisasi, dengan tetap mempertimbangkan fleksibilitas dalam situasi darurat.

Selanjutnya, budaya organisasi yang meliputi nilai, sikap, dan kebiasaan dapat menjadi pendorong atau penghambat perubahan teknologi. Komitmen pimpinan menjadi penggerak utama inovasi, melalui dukungan kebijakan, pendanaan, dan keputusan strategis. Selain itu, koordinasi antar-unit menentukan sejauh mana sinergi tercipta, khususnya ketika proses memerlukan persetujuan lintasdirektorat. Terakhir, ketersediaan sumber daya internal seperti dana, infrastruktur, dan fasilitas menjadi modal penting dalam menunjang keberhasilan implementasi sistem.

Keseluruhan unsur ini membentuk gambaran kesiapan internal organisasi dalam menghadapi transformasi digital dan tantangan penyaluran dana di situasi bencana.

c. Dimensi Lingkungan (*Environment Context*)

Dalam *TOE Framework*, dimensi lingkungan mencerminkan faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung organisasi namun memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan adopsi dan implementasi teknologi. Hal ini untuk mengidentifikasi tekanan regulatif, dinamika pasar, serta hubungan dengan aktor eksternal menjadi bagian penting dalam konteks lingkungan yang membentuk arah inovasi teknologi organisasi.

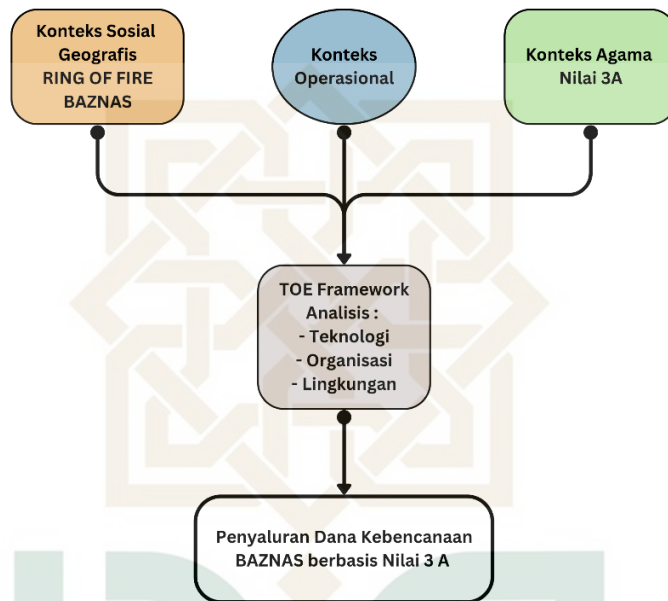
Dimensi lingkungan mengacu pada tekanan eksternal yang memengaruhi adopsi teknologi, seperti regulasi pemerintah, ekspektasi publik, kompetisi antar-lembaga zakat, serta dinamika sosial politik. Dalam konteks ini, nilai-nilai

kelembagaan seperti nilai 3A dapat dianalisis sebagai bagian dari norma lingkungan yang mendorong atau menghambat inovasi. Lingkungan ini juga mencakup kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti BNPB, Kemenag, dan mitra lokal dalam distribusi bantuan.

Dimensi lingkungan dalam TOE *Framework* mencakup berbagai faktor eksternal yang memengaruhi adopsi teknologi. Tekanan regulasi muncul dari aturan pemerintah atau otoritas, seperti Kementerian Agama dan BAZNAS pusat, yang mendorong atau mengatur penggunaan teknologi. Selain itu, tekanan sosial dan harapan publik juga menjadi pendorong penting, di mana masyarakat menuntut layanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Persaingan antar lembaga zakat yang lebih dahulu mengadopsi teknologi turut memicu BAZNAS untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya. Faktor lain adalah kemitraan dan kolaborasi eksternal, yang mencakup kerja sama dengan lembaga seperti BNPB, pemerintah daerah, atau mitra lokal, yang berperan dalam memperlancar proses digitalisasi dan distribusi bantuan. Terakhir, nilai dan norma eksternal, termasuk norma sosial, politik, serta nilai kelembagaan seperti prinsip 3A, memberikan kerangka nilai yang memengaruhi arah dan ruang gerak inovasi teknologi.

Melalui kerangka TOE ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana setiap dimensi berkontribusi terhadap keberhasilan atau tantangan dalam pemanfaatan teknologi untuk penyaluran dana kebencanaan. Pendekatan ini juga

memungkinkan integrasi antara perspektif kelembagaan, teknologi, dan regulasi secara holistik, sesuai dengan realitas operasional BAZNAS di lapangan.



Gambar 1.1 Kerangka Teoritis

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin, yang menekankan bahwa studi kasus adalah penelitian empiris yang bertujuan menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas.⁴⁸ Studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman

⁴⁸ Robert K. Yin, “*Case Study Research: Design and Methods*, 3rd ed.” (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003).

mendalam tentang proses penyaluran dana filantropi kebencanaan oleh BTB, termasuk keterkaitan teknologi, organisasi, dan nilai normatif 3A.

Selain itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan memahami dinamika yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif aktor-aktor yang terlibat. Sisi lain penelitian ini menyangkut nilai-nilai, proses kelembagaan, serta persepsi dan praktik pelaku organisasi dalam penyaluran dana kebencanaan. Pendekatan studi kasus dari Yin juga memungkinkan peneliti menganalisis keterkaitan antar elemen, namun fokusnya tidak hanya pada apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana peristiwa dan keputusan dalam organisasi itu berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat eksploratoris dan interpretatif, guna menggali secara mendalam interaksi antara elemen teknologi, organisasi, dan lingkungan yang memengaruhi sistem penyaluran bantuan.

Sisi lain, pendekatan ini sesuai untuk menangkap kompleksitas hubungan antara inovasi teknologi, struktur kelembagaan, dan nilai-nilai normatif seperti nilai 3A, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan kuantitatif. Melalui studi kasus ini, penelitian mencoba untuk menyatukan berbagai bentuk data wawancara, dokumen kelembagaan, serta pengamatan langsung untuk membentuk pemahaman yang komprehensif.

2. Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pembagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang

komprehensif dan mendalam mengenai praktik penyaluran dana filantropi dalam kebencanaan oleh BAZNAS Tanggap Bencana RI serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam penyaluran dana filantropi kebencanaan di lingkungan BAZNAS. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu secara selektif memilih narasumber yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi aspek penyaluran bantuan, pemanfaatan teknologi, dan penerapan nilai 3A.

Proses rekrutmen informan diawali dengan BAZNAS Tanggap Bencana sebagai unit utama yang menangani distribusi bantuan di lapangan. Selanjutnya, melibatkan bidang teknologi untuk memberikan gambaran tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem digital yang mendukung penyaluran. Pemilihan kemudian diperluas ke bidang kelembagaan yang berperan dalam regulasi, kebijakan, dan tata kelola internal, bidang administrasi yang mengelola proses pengajuan hingga pencairan dana, serta bidang monitoring yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Secara keseluruhan, terdapat delapan orang informan yang terlibat dalam penelitian ini. Uraian lebih rinci mengenai profil masing-masing informan dibahas pada Bab II.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi dan literatur yang relevan dengan fokus kajian. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat dan mengonfirmasi temuan dari data primer, sekaligus memperluas konteks analisis. Dokumen yang dimaksud meliputi sistem pelaporan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), Surat Edaran BAZNAS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Prinsip 3A, PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Dana ZIS, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel ilmiah, tesis, jurnal, dan publikasi lain yang membahas filantropi Islam, kebencanaan, serta adopsi teknologi informasi pada lembaga sosial, disertai pengamatan langsung di BAZNAS.

Pengumpulan data dilaksanakan pada periode Maret hingga Juni 2025, dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dengan panduan yang disusun berdasarkan kerangka TOE *Framework* dan dikaitkan dengan nilai 3A untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik para informan; studi dokumen yang mencakup analisis regulasi, laporan resmi, dan arsip kelembagaan guna memperkuat serta mengonfirmasi temuan lapangan; serta observasi partisipatif melalui keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan BTB di bidang teknologi dan

kebencanaan. Adapun uraian lebih rinci mengenai profil informan akan dibahas pada Bab II.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *open, axial dan selective coding* yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin. Dalam penelitian ini, *Grounded Theory* tidak diposisikan sebagai kerangka teori penelitian, melainkan sebagai Teknik atau alat analisis kualitatif untuk mengolah data secara induktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kategori, dan tema yang muncul langsung dari data lapangan, sehingga pemaknaan yang dihasilkan benar-benar berakar pada pengalaman dan pandangan informan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

a. *Open Coding*

Pada tahap awal, transkrip wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi unit-unit makna dan konsep awal. Setiap potongan data diberi label kode yang merepresentasikan fenomena yang berulang. Contohnya: “*belum ada sistem digital*”, “*manual lebih fleksibel*”, atau “*3A jadi acuan audit*”.

b. *Axial Coding*

Kode-kode terbuka dikelompokkan menjadi kategori yang lebih besar berdasarkan hubungan sebab-akibat, kondisi kontekstual, dan konsekuensi. Misalnya, kode “*tidak semua staf paham sistem*” dan “*akses internet terbatas di lapangan*” digabungkan dalam kategori hambatan teknologi.

c. Selective Coding

Tahap akhir ini bertujuan mengidentifikasi tema inti (*core category*) yang menghubungkan seluruh kategori sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian.

Contoh: kategori Hambatan Teknologi, Dukungan Organisasi, dan Respon Lapangan dihubungkan menjadi tema inti Integrasi Digitalisasi Penyaluran Dana dengan nilai 3A. Tema ini merepresentasikan bagaimana sistem digital tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi distribusi, tetapi juga memperkuat penerapan Aman Syar'i (melalui verifikasi penerima sesuai asnaf), Aman Regulasi (melalui jejak audit yang patuh hukum), dan Aman NKRI (melalui transparansi publik dan akuntabilitas nasional).

Seluruh proses *coding* ini didokumentasikan secara sistematis dan dipetakan ke dalam TOE *Framework*, yang mengelompokkan temuan berdasarkan faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan eksternal. Dengan demikian, *Grounded Theory* berperan sebagai alat untuk menemukan dan mengorganisasi temuan empiris, sementara TOE *Framework* digunakan untuk menganalisis keterkaitan faktor-faktor tersebut secara konseptual. Untuk memperjelas proses analisis, hasil *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* dapat dilihat secara lengkap pada halaman lampiran tesis ini.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- BAB I - Pendahuluan** Bab ini memuat latar belakang yang menguraikan urgensi penelitian terkait penyaluran dana filantropi dalam kebencanaan oleh BAZNAS Tanggap Bencana di era digital. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan (*TOE Framework*), metode penelitian kualitatif studi kasus.
- BAB II - Latar Kelembagaan dan Lokasi Penelitian** Bab ini memberikan gambaran kontekstual dari lokasi dan objek penelitian. Uraian dimulai dengan peta kebencanaan di Indonesia, yang menunjukkan tingkat kerentanan. Selanjutnya dibahas pula profil umum lembaga filantropi dalam konteks kebencanaan, profil kelembagaan BAZNAS secara umum, serta unit BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) sebagai fokus kajian. Bab ini juga menyajikan deskripsi singkat mengenai profil para informan (menggunakan kode), yang dipilih berdasarkan

keterlibatan langsung mereka dalam proses distribusi dan kebijakan kebencanaan.

BAB III - Hasil
Penelitian

Bab ini menyajikan temuan lapangan dari hasil wawancara dan studi dokumen, yang dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama:

1. Pemetaan proses penyaluran dana kebencanaan filantropi oleh BAZNAS (dianalisis melalui aspek organisasi dalam TOE),
2. Bentuk pemanfaatan teknologi dalam proses penyaluran (dianalisis melalui aspek teknologi dalam TOE),
3. Faktor-faktor yang memengaruhi sistem penyaluran, termasuk keterkaitannya dengan nilai 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI), yang dianalisis secara lintas aspek: teknologi, organisasi, dan lingkungan (dianalisis dengan TOE *Framework*).

BAB IV - Analisis dan
Pembahasan

Bab ini merupakan bagian interpretatif dan analitis dari penelitian, di mana temuan lapangan dikaitkan secara mendalam dengan kerangka teori TOE. Analisis

difokuskan pada bagaimana konteks internal (organisasi), kesiapan teknologi, dan tekanan eksternal (lingkungan dan regulasi) memengaruhi proses adopsi serta efektivitas sistem penyaluran. Di dalamnya juga dianalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat digitalisasi, serta bagaimana keputusan kelembagaan terbentuk dalam mengelola bantuan kebencanaan secara responsif dan berbasis nilai.

BAB V - Kesimpulan dan Saran Bab ini menyajikan kesimpulan utama yang merangkum seluruh hasil dan analisis yang telah dilakukan, sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyaluran dana filantropi dalam kebencanaan oleh BTB serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses tersebut, dengan menggunakan kerangka TOE *Framework* yang diperkaya dengan nilai kelembagaan 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI). Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyaluran dan Implementasi Nilai 3A

- a. Penyaluran dana kebencanaan di BTB dilakukan melalui koordinasi lintas unit yang terstruktur, melibatkan BTB, Direktorat Keuangan, DALEV, Direktorat TI, dan unit terkait lainnya. Alur penyaluran berjalan secara sistematis melalui tahapan pengajuan → verifikasi → persetujuan → pencairan → pelaporan.
- b. Aman Syar'i tercermin dari kehati-hatian dalam menetapkan penyintas bencana sebagai mustahik sesuai fatwa dan panduan MUI, serta audit syariah Kementerian Agama.
- c. Aman Regulasi ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap SOP, kelengkapan dokumen hukum dan keuangan, serta pelaporan melalui SIMBA sesuai ketentuan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2023.

- d. Aman NKRI diwujudkan dalam prioritas respons cepat di wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah strategis nasional untuk menjaga stabilitas sosial.
- e. Meskipun nilai 3A telah diinternalisasi dalam praktik, indikator teknis untuk mengukur penerapannya secara kuantitatif belum tersedia, dan saat ini masih dalam tahap pengembangan oleh DALEV dan Direktorat Kajian.

2. Pemanfaatan Teknologi

- a. BTB telah memanfaatkan sistem digital internal seperti SIMBA, SIMKEU, intranet, serta *dashboard* monitoring untuk mendukung pengajuan, verifikasi, pelaporan, dan pencairan dana. Sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan keteraturan administrasi, pelacakan bantuan, dan akuntabilitas data.
- b. Pemanfaatan teknologi informal seperti *WhatsApp*, *Google Drive*, dan *Kobo Toolbox* juga menjadi pendorong penting, khususnya di lapangan saat menghadapi keterbatasan infrastruktur.
- c. Kendala utama yang masih dihadapi adalah belum terintegrasinya seluruh proses dalam sistem *end-to-end*, masih adanya proses persetujuan manual dengan tanda tangan basah, keterbatasan jaringan di wilayah terdampak bencana, serta belum adanya interoperabilitas data antar lembaga mitra.

3. Analisis TOE Framework dan Integrasi Nilai 3A

a. Dimensi Teknologi

Hasil penelitian menguatkan bahwa *availability*, *compatibility*, dan *ease of use* adalah faktor penting dalam adopsi teknologi kebencanaan. SIMBA, SIMKEU, intranet, dan *dashboard* internal membantu keteraturan administrasi dan pelacakan bantuan.

Dilihat dari aman Syar'i, dimana teknologi mendukung klasifikasi mustahik sesuai fatwa MUI dan audit syariah, namun belum ada fitur sistem yang secara otomatis menguji kesesuaian penyaluran dengan kriteria syar'i. Sisi Aman Regulasi terkait sistem, seperti SIMBA telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai PERBAZNAS, namun proses approval digital belum diakui secara legal setara tanda tangan basah. Kemudian Aman NKRI dimana teknologi membantu penyaluran di wilayah strategis nasional, tetapi keterbatasan jaringan menghambat distribusi data real-time.

Maka diperlukan *system alignment* yang mengintegrasikan indikator teknis 3A ke dalam fitur digital (misalnya filter syariah otomatis, validasi regulasi, dan pelaporan kontribusi NKRI).

b. Dimensi Organisasi:

Penelitian menegaskan pentingnya *top management support*, SOP, dan koordinasi lintas unit sebagai pendorong adopsi teknologi. Dari sisi Aman Syar'inya SOP sudah mengatur verifikasi asnaf secara manual, tetapi belum ada

checklist digital yang terhubung dengan fatwa atau panduan MUI. Kemudian Aman Regulasi, prosedur administrasi sudah sesuai standar hukum, tetapi masih kaku di situasi darurat sehingga memperlambat distribusi. Terkait Aman NKRI, koordinasi antarunit mendukung distribusi di daerah strategis, namun belum ada protokol khusus yang memprioritaskan lokasi rawan NKRI dalam sistem persetujuan digital.

Maka dibutuhkan *regulatory flexibility* dalam kebencanaan, SOP dan sistem digital harus memungkinkan persetujuan cepat berbasis otorisasi elektronik tanpa mengurangi akuntabilitas hukum.

c. Dimensi Lingkungan

Hasil dari dimensi lingkungan adalah adanya *Regulatory pressure* seperti PERBAZNAS, audit ISO dan *external collaboration* seperti ke lembaga pemerintah KEMENAG, KOMDIGI, BSSN, BI dan lainnya yang ikut mendorong transformasi digital.

Untuk Aman Syar'i, kolaborasi dengan MUI memastikan penerima manfaat sesuai kriteria syar'i, namun belum terdigitalisasi dalam mekanisme antar-lembaga. Selanjutnya Aman Regulasi adanya tekanan regulasi memperkuat kepatuhan pelaporan, tetapi ketidaksinkronan SOP pusat-daerah dapat menurunkan konsistensi akuntabilitas. Dari sisi Aman NKRI adanya kolaborasi lintas lembaga mendukung distribusi di wilayah perbatasan dan

rawan konflik, namun ekspektasi pejabat daerah yang ingin percepatan tanpa prosedur dapat melemahkan standar nasional.

Maka perlu mekanisme koordinasi tanggap darurat berbasis kesepakatan lintas lembaga yang menggabungkan regulasi pusat, kebutuhan daerah, dan prinsip 3A.

4. Kontribusi Teoritis dan Temuan

Penelitian ini mengonfirmasi adanya relevansi antar dimensi TOE *Framework* dalam konteks filantropi kebencanaan, namun sisi lain yang sangat dominan masih terdapat di teknologi yang *hybrid* dan kesiapan organisasi. Dari dimensi lingkungan belum dapat menjelaskan dengan lebih mendalam terkait faktor external yang mendorong lembaga filantropi dalam bertransformasi. Sisi lain penelitian yang menjadikan nilai moral (3A) berfungsi sebagai *normative-ethical filter* yang memengaruhi keputusan strategis di setiap dimensi TOE, namun belum terdigitalisasi secara penuh.

Hasil penelitian ini juga membuka peluang kajian lebih lanjut dan mendalam mengenai model yang mengintegrasikan nilai moral dengan praktik kelembagaan filantropi. Salah satu arah pengembangan yang dapat diteliti ke depannya adalah gagasan model terkait penelitian digital-konvensional (*Hybrid Digital*), kemudian faktor kelembagaan (*Organization*) dan faktor moral atau nilai normatif (*Ethics*), yaitu semacam kerangka konseptual yang memadukan pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan konvensional dengan penguatan peran organisasi serta peneguhan nilai

etika kelembagaan. Model ini masih bersifat usulan konseptual dan memerlukan kajian mendalam untuk diuji kelayakan serta relevansinya. Harapan selanjutnya ada kesempatan untuk pengembangan penelitian terkait *Hybrid Digital Organization Ethics Model (HDOEM)* yang dapat dikembangkan menjadi model baru untuk menjembatani aspek teknologi yang menggabungkan transformasi digital dengan cara konvensional, tata kelola organisasi, dan nilai moralitas di masa mendatang.

Dengan demikian, sistem penyaluran dana kebencanaan di BTB telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi, namun masih memerlukan penguatan pada integrasi sistem, percepatan proses persetujuan, interoperabilitas data lintas lembaga, serta pengembangan indikator teknis nilai 3A agar dapat diukur, diawasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Saran

Penelitian ini menyadari bahwa penyaluran dana filantropi kebencanaan di lingkungan kelembagaan zakat seperti BAZNAS adalah isu yang kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan eksternal, yang disaring oleh nilai 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Kajian Kuantitatif terhadap Sistem Digital dan Nilai 3A

- a. Penelitian mendatang dapat mengadopsi pendekatan kuantitatif atau *mixed-method* untuk mengukur secara statistik efektivitas sistem digital dan ketercapaian indikator teknis nilai 3A.
- b. Hal ini penting untuk melengkapi temuan kualitatif dengan data terukur, misalnya melalui user satisfaction survey terhadap mustahik, muzaki, dan petugas lapangan.

2. Eksplorasi Implementasi TOE-3A di BAZNAS Daerah

- a. Studi ini hanya berfokus pada BAZNAS RI, sementara implementasi sistem dan penerapan nilai 3A di BAZNAS provinsi/kabupaten/kota berpotensi menunjukkan variasi besar karena perbedaan kapasitas teknologi, struktur organisasi, dan dukungan lingkungan.
- b. Penelitian komparatif antar daerah akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai adaptasi dan kendala di tingkat lokal.

3. Pengkajian Kolaborasi dan Integrasi Data Antar-Lembaga

- a. Mengkaji strategi dan hambatan integrasi data antara BAZNAS dengan mitra strategis seperti Kementerian Agama, BNPB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemensos, dan pemerintah daerah.
- b. Fokus pada solusi interoperabilitas sistem, *data governance*, dan pembagian peran kelembagaan untuk mendukung pelaporan end-to-end.

4. Pendalaman Perspektif Penerima Manfaat dan Relawan

- a. Melakukan kajian partisipatif untuk mengetahui persepsi mustahik dan relawan terhadap aspek kecepatan, keadilan distribusi, serta akuntabilitas.
- b. Perspektif lapangan ini dapat menjadi masukan strategis dalam penyempurnaan SOP dan sistem digital, sekaligus menjadi *feedback loop* dalam penerapan nilai 3A.

5. Evaluasi Penerapan Indikator Teknis Nilai 3A

- a. Setelah indikator teknis nilai 3A selesai disusun dan diuji coba oleh BAZNAS pada semester 2 tahun 2025, perlu dilakukan penelitian evaluatif untuk mengukur efektivitas penerapannya di lapangan.
- b. Kajian ini dapat menjadi dasar penyusunan model operasionalisasi TOE-3A yang tidak hanya normatif, tetapi dapat dimonitor, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui sistem digital.
- c. Contoh indikator yang dapat dikembangkan meliputi:

1) Aman Syar'i.

Persentase penyaluran bantuan kepada mustahik sesuai kategori asnaf berdasarkan fatwa MUI, jumlah program kebencanaan yang telah lolos audit syariah, dan kesesuaian program dengan ketentuan distribusi dana zakat.

2) Aman Regulasi.

Tingkat kepatuhan pelaporan SIMBA sesuai jadwal PERBAZNAS, persentase kelengkapan dokumen administrasi pencairan dana, dan jumlah temuan audit internal/eksternal terkait penyaluran bantuan kebencanaan.

3) Aman NKRI

Persentase program yang menjangkau wilayah perbatasan, terpencil, atau rawan konflik; waktu rata-rata respons dari kejadian bencana hingga distribusi bantuan tahap pertama; dan keterlibatan unsur TNI/Polri atau pemerintah daerah dalam pengamanan serta koordinasi distribusi bantuan.

6. Pengembangan Apps Penyaluran Dana Kebencanaan

Untuk menjawab kebutuhan integrasi sistem dan memperkuat penerapan nilai 3A, BAZNAS dapat mengembangkan *Apps Mobile* yang memadukan seluruh proses penyaluran dana filantropi kebencanaan secara terhubung dan real-time. Menu utama yang dapat disertakan antara lain:

- a. **Registrasi & Verifikasi Mustahik:** Modul verifikasi berbasis KTP/NIK, pencocokan data dengan *database* nasional, dan kategori *asnaf* sesuai fatwa MUI (Aman Syar'i).
- b. **Pengajuan & Persetujuan Digital:** Formulir pengajuan bantuan, *workflow* persetujuan berjenjang yang sudah *digitally signed*, serta pelacakan status pengajuan (Aman Regulasi).

- c. **Integrasi Logistik & Distribusi:** Modul pencatatan stok logistik, rute distribusi, dan integrasi GPS untuk *tracking* bantuan hingga titik penyaluran.
- d. **Pelaporan *Real-time* & Dashboard 3A:** Tampilan capaian penyaluran, indikator nilai 3A, serta *open data* terbatas yang dapat diakses publik untuk transparansi (Aman NKRI).
- e. **Integrasi Lintas Lembaga:** API untuk berbagi data dengan Kemenag, BNPB, Kemensos, Pemda, dan lembaga mitra lainnya.
- f. **Mode Operasi *Offline*:** Fitur *offline data capture* untuk daerah tanpa sinyal, dengan *auto-sync* saat jaringan tersedia.
- g. **Pelibatan Relawan & Donatur:** Menu koordinasi relawan, publikasi kebutuhan lapangan, dan laporan langsung ke donatur untuk meningkatkan partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartnell, Caroline. *Philanthropy in Indonesia: A Working Paper*. Philanthropy for Social Justice and Peace, February 2020.
- Setyarini, Desyana, *Program Sedekah Air YBM BRI di Kabupaten Gunung Kidul*, dalam *Praktik Filantropi Sosial*(Yogyakarta: Ilmu Sosial UGM, 2019).10
- Louis, Tornatzky G. and Mitchell Fleischer, *The processes of technological innovation*. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1990
- K. Yin, Robert, *Case Study Research: Design and Methods*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003.
- Makhrus. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Sinambela, Marzuki, *et al. Mitigasi dan Manajemen Bencana*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Corbin, Juliet, and Anselm Strauss. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- ARTIKEL / PAPER**
- As, Muhammad Rizaludin. “Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia.” *TADABBUR: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>
- Al-Daihani, Meshari et al., “Islamic Social Finance and Its Potential in Addressing Natural Disaster Emergencies and Advancing Sustainable Development Goals: A Proposed Model,” *International Journal of Ethics and Systems*, March 24, 2025, <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2024-0138>.
- Aulia, Agustina Anjani. *Perancangan Aplikasi Mobile Android dalam Program Mitigasi Bencana (Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa)*. Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia, 2023. <https://repository.stiki.ac.id/2125/>

- Baker, Jeffrey. “*The Technology–Organization–Environment Framework.*” In *Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society*, Vol. 1, edited by Yogesh K. Dwivedi, Michael R. Wade, and Scott L. Schneberger, 231–245. New York: Springer, 2012. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6108-2_12.
- Cornelio, Jayeel and Julio C. Teehankee, “*Disasters and the Rise of Global Religious Philanthropy,*” *Diogenes* 65, no. 1 (February 2024): 131–43. <https://doi.org/10.1017/S0392192123000135>
- Fauzia, Amelia. “*Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice.*” *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (December 30, 2017): 223–236. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>
- Firdaus, Rahmat, Rizal Fahlefi, Moh. Wadi, and Kamali. “*The Role of Islamic Philanthropy in Disaster Relief in Indonesia and Japan.*” *Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement* 1, no. 1 (January 23, 2025): 35–51. <https://doi.org/10.63919/ajmpce.v1i1.12>.
- Haris, Nurhayati et al., “*Disaster Risk Index on Disaster Management Budgeting: Indonesia’s National Data Set,*” *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies* 15, no. 1 (February 17, 2023). <https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1365>
- Huda, Fatkur, Arin Setiyowati, Thoat Stiawan, and Erdin Nadid. “*Strategi Digital Fundraising dalam Peningkatan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lazismu Jombang.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 115–120. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12118>
- Hulwati Hulwati et al., “*Zakat for Humanity in Disaster Mitigation,*” *International Journal of Sustainable Development and Planning* 19, no. 5 (May 29, 2024): 1929–39. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190531>
- Lestari, Puji, Eko Teguh Paripurno, Hikmat Surbakti, and Dikau Mahardika Pratama. “*Model Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana di Kabupaten Karo Berbasis Web.*” *Jurnal Komunikasi* 16, no. 1 (October 29, 2021): 47–62. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss1.art4>.
- Muslim, Eriman, dan Sari Viciawati Machdum. “*Changes of Local to Global Organisations at Pos Keadilan Peduli Ummat Human Initiative.*” *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33751/jhss.v7i1.7389>.

- Michelotto, F.; Joia, L.A. *Organizational Digital Transformation Readiness: An Exploratory Investigation*. *J. Theor. Appl. Electron Commer. Res.* 2024. <https://doi.org/10.3390/jtaer19040159>
- Mardiah, Siti, “*Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam,*” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 1 (Juni 1, 2018): 64–83. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>
- Maulana, Said Firman and Sakir Sakir, “*Evaluating The Effectiveness of Information and Communication Technologies (Icts) in Fire Response in Disaster Management in Batam, Indonesia,*” *International Journal of Social Service and Research* 4, no. 02 (2024): 573–84, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i02.700>.
- Maulida, Sri, Fahmi Al Amruzi, Budi Rahmat Hakim, and Irfan Syauqi Beik. “*Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia.*” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (February 1, 2022): 94–109. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art7>
- Mubarak, Darihan, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Hairunnizam Wahid, dan Aimi Anuar. “*Covid-19 Impact on Technology Usage: An Empirical Evidence from Indonesia Zakat Institutions.*” *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)* 4, no. 1 (August 15, 2022): 25–42. <https://doi.org/10.20885/AJIM.vol4.iss1.art3>.
- Pulungan, Sulaika, Ali, Amirul Listiyantomo Ali, Muhammad Hasbi Zaenal, and Nofrianto. “*The Digital Innovation in Zakat Collection and Distribution: Opportunities and Challenges.*” *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, 2024, 423–32. <https://doi.org/10.37706/iconz.2024.911>.
- Pertaminawati, Hendra. “*Peran Filantropi Islam Wakaf dalam Kebencanaan.*” *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 8, no. 1 (January 7, 2025): 21–44. <https://doi.org/10.24853/ma.8.1.21-44>.
- Partelow, Stefan. “*Social Capital and Community Disaster Resilience: Post-Earthquake Tourism Recovery on Gili Trawangan, Indonesia.*” *Sustainability Science* 16, no. 1 (January 2021): 203–220. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00854-2>.
- Samiri, Muliani, Nilwana, A., Nonci, N., Ahmad, J., and Fitriani, F. “*Community Engagement and Participation in Flood Disaster Mitigation: A Case Study of Sidenreng Rappang Regency, Indonesia.*” *Society* 12, no. 1 (2024): 129–139. <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.472>.

- Septiarini, Dina Fitriasia. “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya.” *Akrual: Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2011): 172–199. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>.
- Sitorus, Tulus Irpan Harsono. “Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Alternatif Sumber Dana Penanggulangan Bencana Alam.” *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 11, no. 2 (2020): 103. <https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/download/167/157/163>.
- Suradi, Agustinus. “A Theoretical Extension of Technology Organization Environment (TOE) in E-Government: A Systematic Literature Review and Theory Evaluation.” *Journal of Computer Science and Technology* 5, no. 1 (Mei 2025): 29–36. <https://doi.org/10.54840/jcstech.v5i1.361>.
- Srilestari, Eka Puji, “Navigating the New Normal: Digital Transformation and Islamic Social Finance Strategies,” *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, 2023, 187–96, <https://doi.org/10.37706/iconz.2023.685>.
- Sylviani, Dewi, and Tohani, Entoh. “Developing Entrepreneurship Program for Rural Community with WhatsApp as A Social Capital.” In *Proceedings of the 1st International Conference on Continuing Education and Technology (ICCOET 2021)*, vol. 589, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2021.
- Taber, Niloufer et al., “Paper Versus Digital Data Collection Methods for Road Safety Observations: Comparative Efficiency Analysis of Cost, Timeliness, Reliability, and Results,” *Journal of Medical Internet Research* 22, no. 5 (2020): e17129, <https://doi.org/10.2196/17129>.
- Tuankumala, Muhammad Agip, and Arminingsih, Diah. “Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalimantan Barat.” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam 1* (2023).173-179. <https://repository.uinsaizu.ac.id/26966/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20Program%20Studi%20Ekonomi%202023.pdf>
- Understanding Natural Hazards: Risks Facing Indonesia (Center For Excellence In Disaster Management & Humanitarian Assistance*, 2020). https://www.cfdmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=OCNVOF_NKIk%3D&portalid=0
- World Bank Group and Asian Development Bank, Climate Risk Country Profile* (World Bank, Washington, DC and Asian Development Bank, Manila, 2021).

<https://doi.org/10.1596/36379>.
<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/700411/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>

Yusrin, Erlin Annisa, and Muhamad Zen. “*The Impact of Using The SIMBA Application on The Management of ZIS BAZNAS Funds in South Tangerang City.*” 2024.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/munazzama/article/view/22783/pdf>.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Kamaru Salam Yusof, and Abdul Ghafar Ismail, “Findings the Solution of Zakat for Disaster Relief”, (*PUSKAS Working Paper Series : Paper presented at the World Zakat Forum International Conference*), 2018.

<https://www.puskasbaznas.com/publications/pwps/870-findings-the-solution-of-zakat-for-disaster-relief>

Zubaidah, Siti and Afifah Afifah, “*Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia,*” *International Conference of Zakat*, October, 2020.

<https://doi.org/10.37706/iconz.2020.227>

RUJUKAN WEBSITE

Alfamidi, “Laporan Penyaluran Sedekah Konsumen Januari–Mei 2024,” Alfamidiku.com, 2024, accessed July 6, 2025.
<https://alfamidiku.com/berita/perusahaan/laporan-penyaluran-sedekah-konsumen-januari--mei-2024>.

BAZNAS RI, “BAZNAS Tekankan Pentingnya Prinsip 3A dalam Pengelolaan Zakat,” accessed May 22, 2025. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Tekankan_Pentingnya_Prinsip_3A_dalam_Pengelolaan_Zakat/1355.

BAZNAS RI, “Gandeng BAZNAS, PT Paragon Innovation and Technology Bantu Masyarakat Palestina Rp1 Miliar,” baznas.go.id, 2023, accessed July 6, 2025.
https://baznas.go.id/news-show/Gandeng_BAZNAS,_PT_Paragon_Innovation_and_Technology_Bantu_Masyarakat_Palestina_Rp1_Miliar/1708.

BAZNAS RI, PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. accessed July 3, 2025. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pedoman Sosialisasi Penanggulangan Bencana, accessed July 3, 2025. <https://bnpb.go.id/pedoman-sosialisasi-penanggulangan-bencana>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, accessed July 4, 2025. <https://www.bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peraturan-kepala/2008/perka-4-tahun-2008.pdf>.
- BAZNAS RI, "BTB Goes to School Ramadhan 2025, Edukasi Mitigasi Bencana di 310 Sekolah," 2025. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Gelar_BTB_Goes_to_School_Ramadhan_2025_Edukasi_Mitigasi_Bencana_di_310_Sekolah/2957.
- BAZNAS RI, "SIMBA-UPZ: Penguatan Pelaporan dan Pengendalian Zakat Digital," baznas.go.id, accessed May 22, 2025. https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan_Pengendalian_dan_Pelaporan_Zakat_BAZNAS_Luncurkan_SIMBA-UPZ/2440.
- BAZNAS RI, "Program Kebencanaan". Accessed May 1 2025. <https://baznas.go.id/program/kebencanaan>.
- Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance. *Understanding Natural Hazards: Risks Facing Indonesia*. 2020. Accessed April 30, 2025. https://www.cfedmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=OCNVOF_NKIk%3D&portalid=0.
- Filantropi Indonesia dan The Asia Foundation, Potret Filantropi Indonesia 2020, Jakarta: Filantropi Indonesia, 2020. Accessed July 5, 2025. https://filantropi.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Translated-Philanthropy-in-Indonesia-summary2_INA-FINAL_SS.pdf.
- National Research Council. *Appendix B: Processes of Technological Innovation. In The Role of Public Agencies in Fostering New Technology and Innovation in Building*. Washington, DC: National Academies Press, 1992. Accessed July 17, 2025. <https://nap.nationalacademies.org/read/2070/chapter/9>.
- Geo Portal Data Bencana Indonesia 2024. *Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)* Accessed July 3, 2025. <https://gis.bnpb.go.id/>.
- Meltwater. *2024 Global Digital Report*. Accessed July 16, 2025. <https://www.meltwater.com/en/2024-global-digital-trends>.

- National Geographic Society. "Plate Tectonics: Ring of Fire." *National Geographic Education*. Accessed April 30, 2025. <https://education.nationalgeographic.org/resource/plate-tectonics-ring-fire>.
- Pacific Disaster Center, Indonesia National Disaster Preparedness Baseline Assessment, Hawaii: PDC, 2020, accessed July 3, 2025. https://www.pdc.org/wp-content/uploads/NDPBA_IDN_Final_Report_Bahasa.pdf.
- Perpustakaan DPR RI, "10 Program Prioritas BAZNAS 2025," accessed July 5, 2025. <https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/19300>.
- Portal PPID BAZNAS RI, accessed July 5, 2025. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-informasi-publik>.
- Prihoetami, Astanti, and Farokhah Muzayinatun Niswah. "Wakaf sebagai Sumber Dana Penanggulangan Kebencanaan di Indonesia." *bwi.go.id*. Accessed July 5, 2025. <https://www.bwi.go.id/9334/2024/02/07/wakaf-sebagai-sumber-dana-penanggulangan-kebencanaan-di-indonesia/>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, accessed July 4, 2025. <https://web.bnpb.go.id/jdih/download>.
- TVRI News "Mantan Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Dituntut 6 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Dana Zakat," accessed, August 9 2025, <https://daerah.tvrinews.com/berita/t9c5bum-mantan-ketua-baznas-kabupaten-pasaman-dituntut-6-tahun-penjara-atas-kasus-korupsi-dana-zakat>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). From Digital Promise to Frontline Practice: New and Emerging Technologies in Humanitarian Action. Accessed July 16, 2025. <https://www.unocha.org/publications/report/world/digital-promise-frontline-practice-new-and-emerging-technologies-humanitarian-action>.

LAPORAN

- BAZNAS Tanggap Bencana. *Annual Report BAZNAS Tanggap Bencana Tahun 2022*. Jakarta: BAZNAS RI, 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panduan Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2023.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Informan 3 di Bidang Penyaluran, tanggal 22 Mei 2025

Hasil wawancara dengan Informan 4 di Bidang Penyaluran, tanggal 21 Mei 2025

Hasil wawancara dengan Informan 5 di Bidang Operasional, tanggal 21 Mei 2025

Hasil wawancara dengan Informan 6 di Bidang Operasional, tanggal 15 Mei 2025

Hasil wawancara dengan Informan 7 di Bidang Operasional, tanggal 4 Juni 2025

Hasil wawancara dengan Informan 9 di Bidang Penyaluran, tanggal 26 Mei 2025

Hasil wawancara dengan Informan 10 di Bidang Operasional, tanggal 3 Juni 2025

Hasil wawancara dengan Informan 11 di Bidang Operasional, tanggal 16 Juni 2025